

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai otonomi daerah dengan azas dan sistem desentralisasi. (Qadarochman, 2010)

Dengan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. “Penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik bila didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan

rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka NKRI bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak dan retribusi dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat tumbuh, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah”.

Dengan kewenangan yang ada tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang digali dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengenakan pajak daerah dan retribusi daerah kepada objeknya yakni objek pajak daerah dan objek retribusi di daerah tersebut tertuang dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam penggunaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, jadi anggaran pajak dan retribusi adalah untuk mengoptimalkan PAD, yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran bantu masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Memperluas baris penerimaan

Tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas baris penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki baris data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Tindakan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara dadakan berkala, memperbaiki proses pengawasan, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan administrasi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

6. Daerah harus hindari pengenaan pajak dan retribusi daerah yang bisa

timbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi/ high cost economic dan membawa implikasi kepada perubahan ekonomi di daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan karena berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak.

Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperlihatkan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah objek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, jumlah kamar hotel dan Jumlah Restoran dan Rumah Makan.

Kabupaten Belitung termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Belitung beribukota Tanjungpandan, terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, Pulau Seliu, Pulau Mendanau dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau juga ada disetiap kecamatan, yakni: kecamatan

membalung terdiri dari 36 pulau, kecamatan Tanjung Pandan terdiri dari 5 pulau, kecamatan sijuk terdiri dari 23 pulau, kecamatan badau terdiri dari 8 pulau, dan kecamatan selat nasik terdiri dari 26 pulau.

Pariwisata di Kabupaten Belitung menjadi salah satu aspek pembangunan yang mendapat perhatian tinggi untuk dikembangkan terkait dengan ditetapkannya Belitung sebagai destinasi wisata nasional setelah pulau Bali. Dengan letak geografis dan topografi wilayahnya sebagian besar adalah laut, dataran rendah dan dataran yang paling tinggi di Kabupaten Belitung yang hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 mdpl dengan puncak tertinggi adalah gunung tajam \pm 800m. Kondisi alam belitung cukup potensial dan memungkinkan untuk berkembang menjadi objek wisata alam, budaya dan bahari.

Tabel 1.1.
Jumlah Wisatawan Kabupaten Belitung

Tahun	Jumlah Wisatawan
2004	8.598
2005	19.622
2006	18.305
2007	20.870
2008	31.998
2009	42.233
2010	50.501
2011	83.893
2012	111.613
2013	131.569
2014	199.823

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.

Dari tabel 1.1. diketahui bahwa perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Belitung dalam sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi jumlah wisatawan

mengalami penurunan yaitu dari 19.622 pada tahun 2005 menurun menjadi 18.305 pada tahun 2006.

Pulau Belitung memiliki banyak objek wisata yaitu obyek wisata pantai meliputi: Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Penyabong, Pantai Tanjung Pendam, dan lain-lain. Objek wisata pulau meliputi: Pulau Lengkuas, Pulau Burung, Pulau Kepayang, dan Pulau Batu Berlayar. Objek wisata lainnya meliputi: Air terjun Gurok Beraye, Batu Mentas, Bukit Batu Beginde dan lain-lain.

Keragaman objek wisata dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti Hotel, Restoran, fasilitas rekreasi, tempat dan atraksi wisata, merupakan aset pariwisata besar yang dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan industri pariwisata bagi Pulau Belitung khususnya Kabupaten Belitung dan menjadi peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan penggalan sumber pendapatan dari sektor ini.

Tabel 1.2.
Jumlah Kamar Hotel Di Kabupaten Belitung

Tahun	Jumlah Kamar Hotel
2008	304
2009	307
2010	307
2011	307
2012	609

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.

Hotel berfungsi bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis,

mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Dari tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2011 jumlah kamar hotel cenderung tetap. Kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 609 kamar hotel.

Selain itu novel laskar pelangi karya Andrea Hirata (Putra Belitung Timur) yang telah di cetak kedalam 26 bahasa di 30 negara dan film laskar pelangi yang telah dijadikan ikon Belitung dengan sebutan “Bumi Laskar Pelangi” telah menjadikan belitung sebagai destinasi wisata yang cukup populer bagi wisatawan baik wisatawan lokal, maupun mancanegara. Secara tidak langsung pula telah mengangkat prestise pendidikan muhammadiyah, karena sang pengarang sendiri adalah tamatan SD Muhammadiyah yang menjadikan novel laskar pelangi termasuk karya best seller dan fenomenal. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD (Qadarrochman,2010).

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah

**“ANALISIS PENERIMAAN DAERAH DARI SEKTOR
PARIWISATA DI KABUPATEN BELITUNG”**

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus pada penerimaan daerah dari sektor pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat rekreasi. Pada penelitian ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung diantaranya: Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Hotel dan Jumlah Restoran dan Rumah Makan.

C. Rumusan Masalah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui PAD yang diterima daerah tersebut. PAD ini bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba perusahaan daerah, penerimaan dinas dan pendapatan asli daerah yang sah.

Pulau Belitung memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat semakin bertambahnya objek wisata semenjak adanya film laskar pelangi. Dengan potensi objek wisata yang tinggi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung. Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata dipengaruhi oleh banyak hal, seperti jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, dan jumlah

restoran dan rumah makan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Objek Wisata mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung?
2. Apakah Jumlah Wisatawan mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung?
3. Apakah Jumlah Kamar Hotel mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung?
4. Apakah Jumlah Restoran dan Rumah Makan mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Jumlah Objek Wisata terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung.
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Kamar Hotel terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung.
4. Mengetahui pengaruh Jumlah Restoran dan Rumah Makan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan yang baik mengenai Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan membutuhkannya.

3. Bagi Pemerintah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor pariwisata.
- b. Menyediakan informasi mengenai Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 1994-2014.
- c. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.